

**DAFTAR INFORMASI TEMUAN PENGAWAS INTERNAL
OLEH INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

No.	Temuan	Jumlah	Gambaran Umum	Tindak Lanjut
1.	Aspek Sumber Daya Manusia	1	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="952 515 1482 655">1. Terdapat pegawai yang belum mempebaharui Kartu Permintaan Penambahan Pembayaran Penghasilan (KP4) <li data-bbox="952 655 1482 900">2. Terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum memiliki Karis/Karsu 	<p data-bbox="1500 515 2047 655">Tuntas (Memerintahkan Plt. Kasubbag Umum Kepegawaian secara berkala untuk berkoordinasi dengan pengurus gaji untuk memperbaharui dokumen KP4)</p> <p data-bbox="1500 655 2047 900">Tuntas (Kepala Dinas memerintahkan secara tertulis kepada PNS yang belum memiliki Karis/Karsu untuk melengkapi persyaratan pembuatan Karis/Karsu dan menyerahkan kepada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk selanjutnya diusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah</p>
2.	Aspek Pengelolaan Keuangan	2	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="952 912 1482 1053">1. Kesalahan penganggaran menurut klasifikasi kelompok belanja operasi <li data-bbox="952 1053 1482 1297">2. Kesalahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pertanggungjawaban pengeluaran anggaran yang tidak sesuai dengan mata anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1500 912 2047 1053">1. Tuntas (Telah memerintahkan kepada Kasubbag Keuangan untuk berkoordinasi ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah) <li data-bbox="1500 1053 2047 1297">2. Tuntas (Telah memberikan teguran secara tertulis kepada PPTK dan PPK untuk mempertanggungjawabkan keuangan lebih cermat dalam lebih cermat dan teliti dalam melakukan verifikasi terkait kelengkapan pertanggungjawaban keuangan, dan

				memerintahkan Kasubbag Keuangan dan Aset untuk berkoordinasi ke BKAD Provinsi Kalimantan Tengah perihal reklasifikasi belanja untuk belanja barang jasa senilai Rp. 850.000,- menjadi belanja modal
			3. Pelaksana perjalanan dinas tidak efektif dan efisien	3. Tuntas (Membuat Standar Biaya Satuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng agar pengelolaan anggaran TA. 2023 menjadi lebih baik)
			4. Pembayaran Honorarium PPTK tidak sesuai dengan Surat Keputusan	4. Tuntas (Penetapan Honorarium PPTK yang akan datang akan berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional)

Kepala Dinas,



D. I. DARLIANSJAH, M.Si
 NIP. 196607271993031011